

Hasil Penelitian

KONFLIK KEPENTINGAN KEBIJAKAN IMPOR BERAS INDONESIA DIANTARA MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN PETANI LOKAL

**(CONFLICT OF INTEREST IN INDONESIA'S RICE IMPORT POLICY
BETWEEN MAINTAINING FOOD SECURITY
AND PROTECTING LOCAL FARMERS)**

Ferdian Ahya Al Putra, Ignatius Agung Satyawan, Septyanto Galan Prakoso

Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, 57126
Jawa Tengah – Indonesia
Email: ferdianahya@staff.uns.ac.id

Diterima: 06 Juni 2024; Direvisi: 19 Juni 2025; Disetujui: 17 September 2025

ABSTRAK

Konsumsi dan permintaan beras sebagai makanan pokok masyarakat di Indonesia tergolong tinggi. Di saat yang sama, Indonesia merupakan salah satu produsen beras terbesar di dunia. Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap melakukannya kebijakan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat ketika para petani lokal merasa kebijakan tersebut merugikan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan kebijakan impor beras di Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengikutsertakan perspektif keilmuan hubungan internasional. Di dalam bagian pembahasan, konsep ketahanan pangan dijadikan sebagai pisau analisis. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik studi literatur yang bersumber dari artikel jurnal, buku, laporan pemerintah/organisasi, pemberitaan media massa, dan sumber lain yang terkait dengan kebijakan impor beras Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras di Indonesia bersifat multidimensi baik dalam proses formulasi maupun implementasi. Dalam hal ini, kompleksitas dari berbagai kebutuhan sektor yang terkait secara langsung dengan aktivitas impor beras menjadikan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras untuk memenuhi cadangan beras nasional, akan tetapi di sisi lain mendapat berbagai protes terutama dari petani lokal akibat anjloknya harga akibat kebijakan impor beras. Benturan kepentingan yang terjadi menimbulkan dilema nyata dalam upaya perwujudan ketahanan pangan dan perlindungan akan keberadaan petani lokal.

Kata kunci: ketahanan pangan, kebijakan impor beras, Indonesia, benturan kepentingan

ABSTRACT

Consumption and demand for rice as a staple food for people in Indonesia is relatively high. At the same time, Indonesia is one of the largest rice producers in Indonesia. Even so, the Indonesian government continues to implement a rice import policy to meet food needs in the world. This policy caused controversy in society when local farmers felt that the policy was detrimental to them. This research aims to analyze conflicts of interest over rice import policies in Indonesia using a qualitative descriptive method involving the scientific perspective of international relations. In the discussion section, the concept of food security is used as a tool for analysis. To obtain data, the author used literature study techniques sourced from journal articles, books, government/organization reports, mass media reports, and other sources related to Indonesia's rice import policy. The research results show that the rice import policy in Indonesia is multidimensional in both the formulation and implementation processes. In this case, the complexity of various sector needs that are directly related to rice import activities has made the government take a policy to import rice to meet national rice reserves, but on the other hand it has received various protests, especially from local farmers due to the drop in prices due to the

rice import policy. The conflict of interest that occurs creates a real dilemma in efforts to realize food security and protect the existence of local farmers.

Keywords: food security, rice import policy, Indonesia, conflict of interest.

PENDAHULUAN

Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Beras juga merupakan salah satu bagian dari kategori sembilan bahan pokok (Sembako). Data menunjukkan pada tahun 2019 konsumsi beras Indonesia mencapai 28,69 juta ton, dimana sektor rumah tangga menyumbang 72% dari total konsumsi beras nasional sebesar 20,68 juta ton (BPS, 2021). Sementara itu, beberapa data menyebutkan Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan jumlah konsumen beras terbesar di dunia pada periode 2021-2022. Data menunjukkan total konsumsi beras Indonesia pada periode tersebut mencapai 35,6 juta metrik ton. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Vietnam yang mencapai 73,3 juta metrik ton (Shahbandeh, 2022).

Angka di atas menandakan bahwa nasi merupakan makanan pokok yang wajib dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini ketersediaan beras merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin ketersediaan pangan khususnya beras. Di Indonesia, khususnya di pedesaan, banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Profesi ini merupakan salah satu profesi yang vital, khususnya untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Data di atas menunjukkan data konsumsi beras di Indonesia.

Sedangkan berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras diperkirakan mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 1,25 juta ton GKG atau 2,31 persen dibandingkan produksi beras pada tahun 2021 yaitu sekitar 54,42 juta ton MPD. Kemudian produksi beras di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 32,07 juta ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 718,03 ribu ton atau sekitar 2,29 persen dibandingkan produksi padi tahun 2021 yang sebesar 31,36 juta ton (BPS, 2022a). Jika kita bandingkan dengan data kebutuhan konsumsi beras di Indonesia, jumlah produksinya masih belum mampu memenuhi konsumsi dalam negeri. Situasi ini tentunya dapat memicu kekurangan pasokan beras di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan impor beras untuk menyikapi situasi di atas. Kebijakan ini selalu dilakukan pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, impor beras Indonesia mencapai 407,7 ribu ton. Dari jumlah tersebut, India paling banyak

mengimpor beras dari India dengan total 215,3 ribu ton (BPS, 2022b). Meski demikian, kebijakan impor yang dilakukan pemerintah menuai kontroversi di masyarakat, terutama dari kelompok petani. Misalnya, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana impor beras karena menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan.

Pernyataan tersebut menanggapi kabar Badan Urusan Logistik Nasional (Bulog) mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Argumennya, impor beras tidak boleh dilakukan jika produksi dalam negeri masih mencukupi, padahal sebelumnya Kementerian Pertanian telah menyatakan stok beras di Indonesia mencukupi (Putri, 2022a). Apalagi menurut BPS, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada tahun 2023. Jumlah impor ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir (Nugroho, 2024). Situasi di atas berdampak pada petani lokal. Ketika stok beras di dalam negeri meningkat, maka menurut hukum permintaan dan penawaran, hal ini dapat mempengaruhi harga beras.

Permasalahan ini selalu terjadi setiap tahunnya. Meski pemerintah beralasan hal ini merupakan upaya menjaga ketahanan pangan atau mencegah kelangkaan, namun pada akhirnya para petani merasa kebijakan impor tersebut dapat merugikan mereka sebagai produsen utama beras di Indonesia. Sangat disayangkan, harga pangan kembali naik. Para pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebutkan kenaikan harga beras yang terjadi dalam empat bulan terakhir, mencapai Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium, merupakan yang "tertinggi sepanjang sejarah" (BBC, 2024). Kondisi ini kembali menjadi alasan pemerintah melakukan impor sebagai upaya menyeimbangkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan beras.

Penelitian mengenai kebijakan impor di Indonesia sebelumnya telah ditulis oleh para sarjana. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa produksi beras dalam jangka pendek mempunyai dampak positif terhadap impor, meskipun menurut teori, produksi akan merugikan impor beras. Menurut peneliti sebelumnya, keadaan tersebut terjadi karena peningkatan produksi beras dibarengi dengan peningkatan konsumsi beras, dan surplus beras tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah (Paipan & Abrar, 2020). Kemudian penelitian lain

menunjukkan bahwa harga beras lokal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia pada tahun 2006-2020.

Temuan menunjukkan bahwa harga beras impor seringkali lebih murah dibandingkan harga beras lokal sehingga ketika harga beras lokal naik namun harga beras impor turun, masyarakat memilih untuk membeli beras impor yang relatif murah dibandingkan beras lokal yang mahal. beras (Ruvananda & Taufiq, 2022). Basuki dkk (2021), menemukan bahwa pemicu besarnya polemik impor di Indonesia disebabkan oleh kerugian bagi petani lokal jika harga beras impor jauh lebih rendah dibandingkan harga beras petani lokal. Kemudian masyarakat menilai pasokan kebutuhan beras di Indonesia masih cukup untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga kebijakan impor tidak relevan.

Terdapat temuan bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan produksi. Sebab, ada anggapan bahwa produksi beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan, namun penting untuk memiliki cadangan jika terjadi kekurangan. Untuk memastikan pasokan pangan yang stabil di dalam negeri, pemerintah Indonesia membeli beras dari negara tetangga, Vietnam dan Thailand (Adit et al., 2024).

Sementara itu, penelitian lain juga melihat bahwa Kementerian Pertanian dapat menerapkan berbagai kebijakan seperti mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (hilir pertanian atau agroindustri), terutama untuk mengurangi kehilangan hasil baik pada saat panen maupun pasca panen (pengeringan dan penggilingan) (Azahari & Hadiutomo, 2016). Kemudian, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras dari Vietnam ke Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial variabel konsumsi beras ternyata dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel impor beras Vietnam tahun 2010-2021. Artinya, jika konsumsi beras dalam negeri meningkat maka impor beras Vietnam juga akan meningkat. Begitu pula jika konsumsi beras menurun maka volume impor beras Vietnam juga akan menurun (Salsabil & S, 2023).

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa produksi beras nasional selalu berkaitan dengan kebijakan impor di Indonesia, meskipun tidak selalu signifikan. Sementara itu, kebijakan impor di Indonesia tentunya menjadi perbincangan masyarakat mengingat kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta merugikan petani. Dari situasi tersebut penulis melihat adanya kesenjangan pengetahuan yang mendorong penulis memfokuskan penelitian pada kondisi

pemerintah yang sedang mengalami dilema dalam menjaga ketahanan pangan (beras) dan melindungi petani lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Tailor dalam Moleong (2012), mengartikan metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis dilema kebijakan impor beras di Indonesia, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan atau justru dapat merugikan petani lokal. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah kebijakan impor beras Indonesia. Hal ini disebabkan kerena kebijakan terkait impor dipandang sesuatu yang sifatnya final oleh pemerintah yang mana pelaksanaannya akan mempengaruhi variabel dependen yang dalam penelitian ini kali ini adalah ketahanan pangan dan perlindungan terhadap petani lokal.

Penelitian ini menggunakan konsep ketahanan pangan dalam keamanan manusia. Kajian keamanan dalam hubungan internasional kini tidak hanya terbatas pada kajian keamanan non-tradisional (pertahanan, militer). Namun dalam perkembangannya, kajian keamanan meluas ke keamanan non-tradisional, yaitu menyangkut permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan impor yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk melakukan sekuritisasi.

Menurut Copenhagen School, sekuritisasi adalah upaya agen tertentu seperti pemerintah, tokoh masyarakat, dan LSM melalui tindak turut atau pernyataan bahwa suatu hal berpotensi menimbulkan bencana merupakan ancaman atau dikenal dengan ancaman eksistensial terhadap keamanan individu, dan keamanan nasional yang disampaikan kepada masyarakat agar tanggap dan kemudian mendukung tanggap darurat di luar kebijakan normal (Hadiwinata, 2017).

Pada literatur lain, Mahbub Ulhaq memperluas kajian keamanannya ke dalam New Imperatives of Human Security. Idenya adalah bahwa keamanan non-tradisional mencakup berbagai aspek, yang meliputi, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketahanan Pangan mengacu pada kondisi dimana semua orang pada setiap saat mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan pokok, dimana hal ini mensyaratkan bahwa masyarakat mempunyai akses terhadap pangan, bahwa mereka mempunyai "hak" atas pangan, dengan

menanamnya sendiri, dengan membeli, atau dengan memanfaatkan sistem distribusi pangan publik (UNDP, 1994).

Sejalan dengan literatur yang lain, Food and Agriculture Organization (FAO), menerbitkan laporan mengenai Ketahanan Pangan (Food Security) yang pada KTT Pangan Dunia tahun 1996 didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika semua orang, setiap saat, mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan sehat. makanan bergizi yang memenuhi kebutuhannya. pola makan dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 2006). Kondisi di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi ketika seseorang mempunyai akses terhadap pangan pokok. Dalam konteks penelitian ini, beras merupakan salah satu makanan pokok yang diupayakan pemerintah Indonesia terkait ketersediaannya. Pemerintah seolah dihadapkan pada situasi yang dilematis Ketika di satu sisi mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, yang dapat dilakukan melalui impor namun, di sisi lain tindakan tersebut merugikan petani lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Latar Belakang Impor Beras di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia, khususnya mengenai makanan pokok, dalam hal ini adalah beras. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mengimpor beras dari berbagai negara. Data impor menunjukkan jumlah impor beras Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, impor beras Indonesia sekitar 300 ribu ton beras. Kemudian, jumlah impor beras meningkat signifikan sebanyak lebih dari 2,2 juta ton pada tahun 2018. Jumlah impor beras selanjutnya menurun menjadi sekitar 444 ribu pada tahun 2019 dan sekitar 356 ribu pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, jumlah impor beras kembali meningkat menjadi sekitar 404 ribu ton (BPS, 2022b).

Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan alasan mereka melakukan impor karena kondisi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Data Perum Bulog per 14 Maret menunjukkan masih terdapat sisa beras sebanyak 275.811 ton dari sisa impor tahun 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.642 ton di antaranya telah dinyatakan terdegradasi. Bulog menargetkan mampu mendistribusikan beras impor sebanyak 41.365 ton pada tahun 2021 (Timorria, 2021). Mantan Menteri Perdagangan sebelum reshuffle, Muhammad Lutfi mengatakan, idealnya Perum Bulog bisa menyerap 400.000 hingga 500.000 ton pada periode tersebut (2021) untuk menjaga stok di

atas 1 juta ton. Namun hingga memasuki musim panen awal Maret 2021, realisasi pengadaan dalam negeri Bulog disebut masih di bawah 100.000 ton (Timorria, 2021). Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa pasokan beras sangat terbatas sehingga mendorong pemerintah untuk selalu melakukan kebijakan impor beras.

Selain faktor-faktor tersebut, tentunya ada faktor lain yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan impor. Mutiasari dan Indrajaya (2022), menyatakan bahwa terdapat berbagai alasan pemerintah Indonesia melakukan impor yang meliputi, konsumsi, produksi beras, jumlah penduduk, dan cadangan devisa yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia (Mutiasari & Indrajaya, 2022). Penelitian lain juga menemukan bahwa kebijakan impor juga disebabkan oleh tingginya harga beras dalam negeri, peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan konsumsi. Selain itu, alih fungsi lahan menjadi alasan atau penyebab kebijakan impor di Indonesia dimana lahan pertanian diubah menjadi lahan untuk sektor industri, kawasan perdagangan, fasilitas umum, perumahan, dan lain sebagainya (Ariska & Qurniawan, 2021).

Dapat dimengerti bahwa kebijakan impor beras di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks. Sebab, faktor pendorong impor tidak hanya terbatas pada satu aspek saja melainkan berkaitan dengan aspek lainnya. Dalam konteks ini, kelangkaan pangan pokok (beras) menurut konsep sekuritisasi dianggap sebagai ancaman. Kebijakan impor yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan salah satu langkah untuk mengatasi ancaman tersebut, untuk menciptakan ketahanan pangan, yaitu ketika masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap bahan pangan pokok, yang dalam konteks ini adalah beras. Pada akhir tahun 2023, BPS menyatakan terjadi peningkatan impor sebesar 613,61% dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2022 Indonesia mengimpor beras sebanyak 429 ribu ton, dan pada tahun 2021 sebesar 407,7 ribu ton, tahun 2020 sebesar 356 ribu ton dan 444 ribu ton. ribu ton pada tahun 2019 (Nugroho, 2024). Sementara itu, BPS juga mencatat kenaikan harga beras tersebar di 268 wilayah di Indonesia menjelang puasa dan Idul Fitri 2024 (CNN Indonesia, 2024). Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Pengamat Pertanian Khudori mengungkapkan penyebab kenaikan harga beras terjadi karena terjadinya bencana kelaparan, dan baru akan terjadi panen kembali pada bulan April 2024 (Darwati, 2024).

Jika memang panen raya ini kemudian mendorong stok beras dalam negeri melimpah, maka kebijakan impor yang dilakukan

pemerintah perlu dikaji ulang untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan yang dapat merusak harga pasar, terutama bagi produsen lokal. Stabilitas harga juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Ketika stok beras dalam negeri langka, dampaknya harga beras dalam negeri, khususnya dari petani lokal, akan naik. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi masyarakat kelas bawah.

Kontroversi Kebijakan Impor di Indonesia. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa masyarakat cenderung memilih beras dengan harga lebih murah. Harga beras impor lebih murah. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, terdapat perbedaan harga yang besar antara beras dalam negeri dan beras impor. Pihaknya mencatat, harga beras impor berkisar Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitasnya. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan rata-rata harga beras di penggilingan mencapai Rp 10.300 per kilogram (Putri, 2022b).

Kondisi di atas menegaskan bahwa tidak heran jika masyarakat lebih memilih beras impor dibandingkan beras lokal jika dilihat dari segi harga. Di satu sisi, situasi ini memudahkan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan pokok, khususnya masyarakat kelas bawah. Jika berbicara mengenai ketahanan pangan, hal ini tidak lepas dari akses terhadap pangan pokok yang juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagai gagasan konsep ketahanan pangan. Namun di sisi lain, dampak kebijakan impor lebih banyak dirasakan oleh petani lokal. Hal ini disebabkan oleh menurunnya omzet mereka, atau jatuhnya harga beras karena harga beras impor yang lebih murah. Pada akhirnya keuntungan penjualan petani lokal akan menurun.

Kebijakan impor beras ini tentu menuai banyak protes dari para petani. Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mulyatani Kabupaten Pakisjaya, Samsudin mengatakan, impor beras akan menambah beban hidup petani. Keadaan ini semakin menyulitkan petani ketika sebelumnya pemerintah mengurangi kuota pupuk bersubsidi dan menaikkan harga yang berdampak pada peningkatan biaya produksi (Wismabrat, 2021). Lebih lanjut, protes juga datang dari Serikat Tani Indonesia atau SPI yang menyayangkan langkah pemerintah yang mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton pada Desember 2022.

Pasalnya menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP)

SPI. Mujahid Widian, panen raya akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia awal tahun depan (sekitar Januari 2023) (Putri, 2022c). Keadaan tersebut menunjukkan biaya produksi semakin meningkat yang pada kondisi ini dapat berdampak pada naiknya harga dan omzet yang diperoleh petani. Sementara itu, situasi berikutnya menunjukkan bahwa kebijakan impor beras di Indonesia tidak relevan ketika petani lokal sedang mempersiapkan panen raya. Dengan kata lain, pemerintah seharusnya tidak mempunyai alasan lagi untuk menjaga stok beras dalam negeri.

Kondisi sebaliknya tersebut kemudian menimbulkan situasi politik yang menyebabkan pemerintah Indonesia tetap menerapkan kebijakan impor. Hal ini juga diamini oleh Ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Bhima Yudhistira. Ia menilai justifikasi ilmiah atas kebijakan impor tersebut lemah. Situasi ini bukan persoalan produksi pertanian, melainkan sudah memasuki ranah ekonomi politik, yakni soal siapa yang diuntungkan dari margin impor beras (Bramasta, 2021). Indonesia selama ini telah melakukan impor beras dari berbagai negara sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 1.

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia paling banyak melakukan impor beras dari Thailand dan Vitenam. Tentunya terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya impor beras. Sebuah penelitian misalnya menyebutkan bahwa impor beras dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Bahkan penelitian tersebut juga menyebutkan di tengah pandemi pun, jumlah penduduk Indonesia cenderung mengalami peningkatan sehingga pemerintah melakukan impor guna memenuhi kebutuhan beras (Oktaviana et al., 2023).

Sebaliknya, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga beras Indonesia di tingkat produsen lebih mahal daripada harga beras internasional, yaitu Rp 8.950 per kilogram pada November 2020 dan Rp 8.600 per kilogram pada November 2021 (Foodstation, 2021). Beras impor dapat menjadi lebih murah disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya produksi, dan rendahnya tarif. Bahkan, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menilai, harga beras di Indonesia bisa turun sebesar 40,19% apabila semua hambatan non-tarif dihapus (Rizky, 2023). Di satu sisi, kondisi ini menguntungkan bagi konsumen. Namun, di sisi lain ini merugikan bagi produsen dan petani beras lokal.

Tabel 1. Impor beras menurut negara asal utama tahun 2017-2024

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berat Bersih: Ton								
India	32.209,7	337.999,0	7.973,3	10.594,4	215.386,5	178.533,6	69.715,7	246.587,9
Thailand	108.944,8	795.600,1	53.278,0	88.593,1	69.360,0	80.182,5	1.381.921,2	1.364.232,8
Vietnam	16.599,9	767.180,9	33.133,1	88.716,4	65.692,9	81.828,0	1.147.705,3	1.248.245,0
Pakistan	87.500,0	310.990,0	182.564,9	110.516,5	52.479,0	84.407,0	309.309,7	803.844,7
Myanmar	57.475,0	41.820,0	166.700,6	57.841,4	3.790,0	3.830,0	141.204,0	831.379,0
Jepang	72,1	0,2	90,0	0,3	230,3	56,1	61,5	100,7
Tiongkok	2.419,0	227,7	24,3	23,8	42,6	6,0	7,0	19,3
Lainnya	54,3	6,5	744,6	0,3	760,1	364,1	12.933,3	25.011,2
Jumlah	305.274,8	2.253.824,4	444.508,8	356.286,2	407.741,4	429.207,3	3.062.857,6	4.519.420,6
Nilai CIF: 000 US\$								
India	13.397,1	139.158,5	3.018,5	4.849,3	86.276,3	77.739,7	35.505,0	124.541,5
Thailand	60.286,9	386.533,7	38.561,5	76.301,6	41.322,6	44.092,0	804.815,8	862.780,8
Vietnam	6.761,3	360.745,6	16.609,5	51.107,5	32.474,5	42.464,3	668.871,3	752.859,6
Pakistan	34.793,1	134.416,0	67.819,9	41.519,8	20.322,1	35.843,5	182.322,5	472.410,5
Myanmar	19.546,1	15.161,4	56.287,2	21.147,8	1.609,4	1.478,2	88.822,9	480.766,2
Jepang	235,0	1,7	243,2	1,2	578,9	150,3	155,4	256,5
Tiongkok ¹	8.118,7	1.094,1	482,5	479,3	850,5	120,0	142,5	385,7
Lainnya	503,4	17,3	1.231,7	2,4	367,5	154,1	8.388,5	16.254,5
Jumlah	143.641,6	1.037.128,3	184.254,0	195.408,9	183.801,8	202.042,2	1.789.023,9	2.710.255,3

¹Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina

Catatan:

Termasuk Kawasan Berikat

Diolah dari dokumen keabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)

Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Sumber: BPS (2024)

Meskipun masih melakukan impor, nilai impor beras Indonesia mengalami penurunan. nilai impor beras Indonesia lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2024 yang pernah mencapai US\$278,03 juta, atau turun 84,46% secara tahunan (year-on-year/yoY). BPS menyebutkan volume impor beras mencapai 79.361 ton pada Januari 2025. Angka tersebut turun 82,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 442.112 ton.

Berdasarkan data BPS, impor beras pada Januari 2025 yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar (Anggraeni & Dewi, 2025). Data ini tentunya memberikan angin segar bagi petani lokal. Data BPS terbaru menunjukkan volume impor komoditas beras turun drastis pada Januari-Maret 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dimana penurunan

tersebut mencapai 92,26% (Anggraeni & Dewi, 2025).

Hal ini dikarenakan Bulog memiliki cadangan beras yang cukup memadai. Bahkan, per 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tembus 3.701.006 ton, menandai rekor tertinggi sejak BULOG berdiri pada 1969 (Isdarmadji, 2025). Data tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi produksi beras lokal. Dengan kata lain, faktor pasokan yang melimpah di dalam negeri dapat mencegah negara untuk melakukan impor, sesusai dengan upaya mencapai swasembada pangan yang tertuang pada Asta Cita.

Dimensi Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras di Indonesia. Berbicara mengenai ekspor-impor dalam konteks perdagangan internasional, tidak lepas dari dimensi ekonomi politik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mengingat

bahwa aspek politik berkaitan dengan alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Misalnya, pemerintahan Indonesia beroperasi dalam ruang yang diatur oleh hukum internasional yang telah disepakati baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini tidak lepas dari keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia telah secara resmi meratifikasi berdirinya WTO yang dituangkan dalam UU No. 7/1994 tanggal 2 November 1994.

Ratifikasi ini menjawab secara pasti, bahwa setiap keputusan dari WTO harus menjadi hukum nasional bagi Indonesia (Hasibuan, 2015). Situasi ini berarti Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengikat Indonesia ke dalam hukum nasional Indonesia. Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *Agreement on Agriculture* (AoA). Indonesia telah menjadi bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-undang tersebut telah mengatur berbagai bidang kerja sama, termasuk yang mengatur tentang pertanian. Perjanjian di bidang pertanian bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dengan mengurangi hambatan impor, meningkatkan iklim persaingan melalui peningkatan disiplin penggunaan subsidi pertanian baik langsung maupun tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif ketentuan tentang Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan. Perlindungan (Sanitasi dan Fitosanitasi) (UU No. 7 Tahun 1994).

Terlihat bahwa Pemerintah Indonesia berupaya mendorong akses pasar di sektor pertanian. Beras merupakan salah satu komoditas pertanian Indonesia. Ketentuan di atas jelas menunjukkan adanya keinginan untuk mendorong liberalisasi pasar di sektor pertanian, termasuk beras. Situasi ini kemudian mendorong derasnya arus impor komoditas pangan utama seperti beras, gula, jagung, dan kedelai yang sangat membahayakan kondisi pertanian Indonesia (Hasibuan, 2015). Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi pasar yang semakin terbuka di Indonesia menjadi pintu masuk bagi komoditas pertanian, termasuk beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia.

Tingginya permintaan beras mendorong pemerintah Indonesia melakukan impor beras dalam konteks kebijakan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Indonesia meratifikasi atau menjadi bagian dari perjanjian internasional. Ketika Indonesia terikat pada perjanjian tersebut, ruang pasar pemerintah Indonesia menjadi semakin terbatas. Jika

pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan proteksionis, maka konsekuensinya bisa digugat oleh negara lain melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali mengalami gugatan ini. Misalnya saja pada tahun 2019 Indonesia digugat oleh Amerika Serikat (AS) terhadap bawang putih, hal tersebut tertuang dalam hasil laporan Badan Penyelesaian Sengketa WTO yang bertajuk *Indonesia-Impor Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan: Laporan Status Mengenai Implementasi Kebijakan tersebut*.

Pada dokumen Rekomendasi dan Keputusan DSB oleh Indonesia. Melalui laporan tersebut, pemerintah Indonesia diminta segera mencabut dan merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 tentang Hewan dan Produk Hewan.

Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Syaiful Bahri menilai Permentan No 24 Tahun 2018 mewajibkan importir hortikultura menanam bawang putih jika ingin mendapatkan RIPH dan SPI (Cahyani, 2019). Kasus ini bukan kali pertama Indonesia digugat di WTO, dimana sebelumnya gugatan diajukan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru. Kedua negara menggugat Indonesia terkait pembatasan impor pangan dan produk hewani termasuk daging sapi dan unggas.

Keadaan ini disebabkan oleh sebanyak 18 peraturan perdagangan Indonesia yang dianggap mempengaruhi impor hortikultura, hewan, dan produk hewani, yang tidak diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), induk dari WTO sebelumnya yang kemudian dimenangkan oleh AS dan Selandia Baru. (Pasopati, 2016). Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa ruang bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan dibatasi oleh hukum internasional. Pelanggaran terhadap perjanjian di satu sisi menguntungkan pemerintah Indonesia, namun di sisi lain dapat merugikan Indonesia.

Jika pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama terhadap impor beras di Indonesia, tentu bukan tidak mungkin negara lain akan kembali menggugatnya di WTO. Namun jika berbicara mengenai kebijakan impor beras, pemerintah Indonesia selalu beralasan bahwa kebijakan impor beras ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan beras di Indonesia. Pada Desember 2022, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, berpendapat tingginya permintaan beras untuk stabilisasi harga

membuat stok beras di pasar yang terbatas memaksa Bulog melakukan impor untuk menjamin terpenuhinya cadangan beras pemerintah (SBP) sebesar 1,2 juta ton.) (CNBC Indonesia, 2022).

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pangan utama di Indonesia. Jika dilihat dari konsep ketahanan pangan. Hal ini sekaligus juga membuat harga beras lebih terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan Laporan The Ranks of Global Food Security Index (GFSI) tentang keterjangkauan pangan, Indonesia berada di peringkat 63 dengan skor 60,2. Peringkat tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan Thailand yang berada di peringkat 64 dengan skor 60,1. Namun Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia (Economist Impact, 2022).

Keadaan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia sendiri masih belum optimal. Keadaan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat di sini juga merupakan petani lokal yang juga terkena dampak kebijakan impor beras di Indonesia. Faktor yang menjadikan kebijakan impor beras ini kontroversial juga dipengaruhi oleh pemberitaan yang menunjukkan produktivitas beras yang dinilai cukup tinggi pada periode tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog akan mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton sebelum akhir tahun 2022 setelah pemerintah mengizinkan impor sebanyak 500 ribu ton. Namun laporan Kementerian Pertanian menunjukkan produksi beras Indonesia mengalami surplus. Surplus beras Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 1,7 juta ton yang sebagian besar didistribusikan ke rumah tangga, petani, pedagang, dan pabrik penggilingan (Yanwardhana, 2022).

Pendapat kontradiktif muncul dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yang menyatakan impor tersebut dilakukan setelah memperhitungkan kondisi cadangan beras pemerintah yang pada periode tersebut sudah habis, sehingga terpaksa harus melakukan hal tersebut (Putri, 2022c). Dalam konteks ini, dapat dipahami adanya kontradiksi antara data dan argumentasi pemerintah. Pemerintah Indonesia nampaknya sedang dilema, yaitu menjaga ketahanan pangan dengan pertimbangan dapat merugikan petani lokal, atau hanya mengandalkan produksi dalam negeri oleh petani lokal, yang berisiko menyebabkan

kelangkaan pangan, terutama pada saat darurat seperti bencana alam.

Kebijakan impor beras bukanlah perkara sederhana. Berbagai pertimbangan menjadi tolok ukur mengapa kebijakan tersebut diambil. Dimensi politik juga merupakan salah satu dimensi yang memegang peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Di tengah berbagai pro kontra yang ada, kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan menunjukkan tren yang positif, ketika impor beras paruh pertama tahun 2025 menunjukkan penurunan. Hal ini diprediksi dapat menguntungkan petani lokal, karena di satu sisi mereka tidak harus bersaing dengan beras impor, dan harga beras dapat cenderung lebih stabil ketika terdapat pasokan dan permintaan yang seimbang pada pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas bahwa pemerintah Indonesia menghadapi dilema terkait kebijakan impor berasnya. Di satu sisi, pemerintah bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan dengan menjaga pasokan dan cadangan beras nasional yang cukup. Namun, pendekatan ini telah memicu kontroversi karena berdampak negatif terhadap petani lokal, yang menyebabkan harga beras produksi dalam negeri turun signifikan. Selain itu, konsumen sering kali lebih menyukai beras impor, karena harganya bisa lebih murah daripada varietas yang ditanam secara lokal. Di sisi lain, pemerintah tidak mengambil risiko kekurangan pangan dengan menahan diri dari impor. Masalah tersebut muncul dari ketidakkonsistenan dalam alasan di balik impor beras, terutama ketika impor terjadi meskipun ada laporan surplus produksi dalam negeri. Situasi ini menyoroti perbedaan dalam data yang digunakan oleh para pembuat kebijakan. Lebih jauh, masalah ini terkait dengan aspek ekonomi politik, di mana kebijakan Indonesia dipengaruhi oleh perjanjian pertanian internasional. Secara khusus, Perjanjian tentang Pertanian (AoA) mengharuskan Indonesia untuk meliberalisasi pasarnya, yang tentu saja membatasi otonomi kebijakan pemerintah dan membatasi fleksibilitasnya. Oleh karena itu, terdapat langkah yang harus dilakukan dari dua sisi, baik yang bersifat *top-down* dalam konteks kebijakan impor dari pemerintah yang harus semakin akomodatif. Ini juga harus mencakup standar kesejahteraan petani dan parameter ketahanan pangan Indonesia yang harus ditingkatkan dan perlu diobservasi dengan lebih intensif pencapaiannya secara berkala. Tujuan ini salah satunya juga dapat diwujudkan dengan memaksimalkan produksi dalam negeri guna

mendorong swasembada pangan sesuai dengan amanat Asta Cita.

REKOMENDASI

1. Kementerian Pertanian bersama Perum Bulog secara berkala menyediakan data tentang cadangan gabah dan beras sehingga kebijakan impor beras dilakukan pada waktu yang tepat, misalnya ketika cadangan beras nasional menipis yang dapat memicu terjadinya inflasi pada komoditas beras.
2. Perum Bulog agar menyediakan data akurat tentang cadangan beras nasional termasuk dari petani lokal, sebagai pertimbangan jumlah beras yang akan diimpor untuk mencegah terjadinya *oversupply*.
3. Badan Pangan Nasional perlu mempertimbangkan harga pasaran yang ditetapkan pada beras impor supaya tidak terlalu murah, sehingga tidak merusak harga pasaran yang dapat merugikan petani lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Sebelas Maret, yang telah mendukung riset ini melalui nomor penelitian 194.2/UN27.22/PT.01.03/2024.

DAFTAR PUSTAKA

Adit, A., Ilham Ramadhani and Revienda Anita Fitrie (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Impor Beras dalam Konteks Pemenuhan Pangan Nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), pp.15-15. doi:<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2394>.

Anggela, N. L., & Dewi, F. S. 2025. *BPS: Impor Beras RI Turun 92% pada Januari-Maret 2025*. [Online] Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250421/12/1870600/bps-impor-beras-ri-turun-92-pada-januari-maret-2025> [Diakses 25 Juli 2025]

Anggraeni, R., & Dewi, F. S. 2025. *RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya*. [Online] Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250217/12/1840154/ri-masih-impor-beras-dari-thailand-vietnam-di-2025-ini-datanya> [Diakses 08 Juli 2025]

Ariska, F. and Qurniawan, B. 2021. PERKEMBANGAN IMPOR BERAS DI INDONESIA. *Agrimais*, 1(1), pp.27-34.

Azahari, D.H. and Hadiutomo, K. 2016. Analisis Keunggulan Komparatif Beras Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), p.61. doi:<https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.61-73>.

Basuki, Z.M., Putra Hidayat, R.J., Asih, P.S. and Sihidi, I.T. 2021. ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS 1 JUTA TON OLEH PEMERINTAH INDONESIA: DATA DAN

ANALISIS MEDIA SOSIAL. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), pp.474-495.
doi:<https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.485>.

BBC. 2024. *Harga beras naik 'tertinggi dalam sejarah' - 'Ini sangat tidak masuk akal karena kita negara agraris'*. [Online] Dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72ggeq21390> [Diakses 28 Februari 2024].

BPS. 2021. *Konsumsi Bahan Pokok 2019*. [Online] Dari: <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/25/68b1b04ce68c7d6a1c564165/konsumsi-bahan-pokok-2019.html> [Diakses 10 Juli 2025]

BPS. 2022a. *Pada 2022, luas panen padi diperkirakan sebesar 10,61 juta hektare dengan produksi sekitar 55,67 juta ton GKG*. [Online] Dari: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/17/1910/pada-2022--luas-panen-padi-diperkirakan-sebesar-10-61-juta-hektare-dengan-produksi-sekitar-55-67-juta-ton-gkg.html> [Diakses 10 Juli 2025]

BPS. 2022b. *Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2001*. [Online] Dari: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2021.html> [Diakses 10 Juli 2025]

BPS. 2024. *Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023*. [Online] Dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2017-2023.html> [Diakses 10 Juli 2025]

Bramasta, D.B. and Hardiyanto, S. 2021. *Indonesia, Negara Agraris yang Selalu Impor Beras, Mengapa? Halaman all*. [Online] Dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/27/200300265/indonesia-negara-agraris-yang-selalu-impor-beras-mengapa?page=all> [Diakses 10 Juli 2025]

Cahyani, D. R. 2019. *Lagi, AS Gugat Indonesia ke WTO Gara-gara Bawang Putih*. [Online] Dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1171069/lagi-as-gugat-indonesia-ke-wto-gara-gara-bawang-putih> [Diakses 10 Juli 2025]

CNBC Indonesia. 2022. *Dilema Buwas, Penuhi Stok Beras Bulog Hingga Harus Impor*. [Online] Dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221222091359-8-399119/dilema-buwas-penuhi-stok-beras-bulog-hingga-harus-impor> [Diakses 4 Juni 2024].

CNN Indonesia. 2024. *Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa*. [Online] Dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240226164049-92-1067478/kenaikan-harga-beras-menjalar-ke-268-daerah-jelang-puasa> [Diakses 10 Juli 2025]

Darwati, E. 2024. *Pengamat Pertanian Bongkar Penyebab Kenaikan Harga Beras, Imbas Bansos?* [Online] Dari: <https://kabar24.bisnis.com/read/20240213/15/174>

0340/pengamat-pertanian-bongkar-penyebab-kenaikan-harga-beras-imbas-bansos. [Diakses 10 Juli 2025]

Economist Impact. 2022. *Global Food Security Index (GFSI)*. [online] foodsecurityindex.eiu.com. [Online] Dari: <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/>. [Diakses 15 Juli 2025]

FAO. 2006. *Food Security*. [Online] Dari: https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf. [Diakses 15 Juli 2025]

Foodstation. 2021. *Harga Beras RI Dinilai Lebih Mahal dari Tarif Internasional - Food Station*. [Online] Dari: <https://www.foodstation.id/nasional/harga-beras-ri-dinilai-lebih-mahal-dari-tarif-internasional/05/11/2021/> [Diakses 15 Juli 2025]

Hadiwinata, B.S. 2017. *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus utama, alternatif, Dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

Hasibuan, A. I. R. 2015. Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA) - WTO. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 11(1), 125435.

Hidayat, A.A.N. 2022b. *Kecewa Kebijakan Impor Beras, Serikat Petani: Jawa Timur Panen Raya Pertengahan Januari 2023*. [Online] Dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1665442/kecewa-kebijakan-impor-beras-serikat-petani-jawa-timur-panen-raya-pertengahan-januari-2023> [Diakses 4 Juni 2024].

Isdarmadji, N. Q. 2025. *Cadangan Beras Melebihi 3,7 Juta Ton, Indonesia Menuju Kemandirian Pangan*. Kementerian Pendaragunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/cadangan-beras-melebihi-3-7-juta-ton-indonesia-menuju-kemandirian-pangan> [Diakses 15 Juli 2025]

Moleong, L.J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mutiasari, N., & Indrajaya, I. 2022. ANALISIS FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA. *Ejurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11, 1699. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i05.p04>

Nugroho, R.A. 2024. *Parah! Impor Beras RI Cetak Rekor di 2023, Tembus 3 Juta Ton*. [Online] CNBC Indonesia. Dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115151718-4-505835/parah-impor-beras-ri-cetak-rekor-di-2023-tembus-3-juta-ton> [Diakses 28 Februari 2024].

Oktaviana, S., Fathimah, M., Alamanda, M. S., & Nawiyyah. 2023. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA IMPOR BERAS INDONESIA DARI VIETNAM. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 1(4), 258–264. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.348>

Paipan, S. and Abrar, M. 2020. Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia [Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia]. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), pp.53–64. doi:<https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1443>.

Pasopati, G. 2016. *WTO Menangkan Gugatan AS dan New Zealand kepada Indonesia*. [online] ekonomi. [Online] Dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan-gugatan-as-dan-new-zealand-kepada-indonesia>. [Diakses 4 Juni 2024].

Pemerintah Indonesia. 1994. *Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Rizky, M. 2023. *Ternyata Harga Beras Impor Bisa Jadi Murah, Ini Penjelasannya*. [Online] Dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231205120421-4-494634/ternyata-harga-beras-impor-bisa-jadi-murah-ini-penjelasannya> [Diakses 10 Juli 2025]

Putri, R. S. 2022a. *Petani Tolak Impor Beras, Kritik Bulog dan Badan Pangan*. [Online] Dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1659690/petani-tolak-impor-beras-kritik-bulog-dan-badan-pangan> [Diakses 10 Juli 2025]

Putri, R. S. 2022b. *Pemerintah Resmi Impor Beras 200 Ribu Ton, Bapanas: Hanya untuk Kegiatan Pemerintah*. [Online] Dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1665248/pemerintah-resmi-impor-beras-200-ribu-ton-bapanas-hanya-untuk-kegiatan-pemerintah> [Diakses 10 Juli 2025]

Putri, R. S. 2022c. *Pemerintah Resmi Impor Beras 200 Ribu Ton, Bapanas: Hanya untuk Kegiatan Pemerintah*. [Online] Dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1665248/pemerintah-resmi-impor-beras-200-ribu-ton-bapanas-hanya-untuk-kegiatan-pemerintah> [Diakses 10 Juli 2025]

Putri, R. S. 2022d. *Kecewa Kebijakan Impor Beras, Serikat Petani: Jawa Timur Panen Raya Pertengahan Januari 2023*. [Online] Dari: <https://www.tempo.co/ekonomi/kecewa-kebijakan-impor-beras-serikat-petani-jawa-timur-panen-raya-pertengahan-januari-2023-242108> [Diakses 10 Juli 2025]

Ruvananda, A.R. and Taufiq, M. 2022. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia. *KINERJA*, 19(2), pp.195–204. doi:<https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10924>.

Salsabil, Y. P., & S, N. R. I. S. 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Vietnam Ke Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1143-1151.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1221>

Shahbandeh, M. 2023. *Rice consumption by country 2019.* [Online] Dari: <https://www.statista.com/statistics/255971/top-countries-based-on-rice-consumption-2012-2013/>. [Diakses 10 Juli 2025]

Timorria, Ii.F. 2021. *Mendag Bongkar Alasan Rencana Impor Beras, Ini Penyebabnya / Ekonomi.* [Online] Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/12/1369905/mendag-bongkar-alasan-rencana-impor-beras-ini-penyebabnya>. [Diakses 10 Juli 2025]

UNDP. 1994. *Human Development Report 1994.* [online] hdr.undp.org. [Online] Dari: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>. [Diakses 10 Juli 2025]

Wismabrata, M.H. 2021. *Wacana Impor Beras Pemerintah Tuai Protes, Petani: Beban Hidup Bertambah Halaman all.* [Online] Dari: <https://regional.kompas.com/read/2021/03/19/120837178/wacana-impor-beras-pemerintah-tuai-protes-petani-beban-hidup-bertambah?page=all> [Diakses 4 Juni 2024].

Yanwardhana, E. 2022. *Kisruh Impor Beras, Mentan Tegaskan Produksi Lagi Tinggi.* [Online] Dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221207192123-4-394748/kisruh-impor-beras-mentan-tegaskan-produksi-lagi-tinggi> [Diakses 10 Juli 2025]